

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung yang belum efektif. Permasalahan yang dihadapi, bahwa organisasi pelaksana dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung belum sepenuhnya melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya didalam implementasi kebijakan MPMBS tersebut. Sebagai sasaran kebijakan, kepala sekolah belum berperan sebagai *leader* yang inovatif dan kreatif, dewan sekolah belum sepenuhnya mengarahkan, memberikan masukan, dan memonitor implementasi tersebut, komite sekolah juga belum berperan sebagai *advisor*, *supporter*, *controller* dan *mediator* bagi sekolah. Demikian juga dari faktor lingkungan, Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung belum bisa menggali potensi, aspirasi dan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini *policy network* dari Smith : Interaksi diantara para aktor dalam jaringan yang akan menentukan bagaimana kebijakan harus diimplementasikan sebagai inti dari *network governace* yang memfokuskan pada jaringan *interorganisasional*.

Konsep ini digunakan untuk menganalisis jejaring kebijakan yang belum efektif melalui faktor-faktor: organisasi pelaksana, sasaran kebijakan, kebijakan, lingkungan juga aspek kepercayaan, transparansi, tata aturan dan kepemimpinan serta sistem nilai yang berlaku sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam mendeskripsikan jejaring kebijakan yang terjadi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan pada fokus kajian penelitian yang menuntut peneliti untuk melakukan *eksplorasi* mengenai berbagai aspek yang ada dalam fenomena jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan MPMBS di SD Negeri Kota Bandung berdasarkan persepsi dan pengalaman informan. Informan dalam penelitian inia dalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Sekolah SD Negeri, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Pengawas dan Perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan MPMBS di SD Negeri Kota Bandung belum efektif, karena faktor-faktor yang mendukung jejaring kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta perannya sehingga mutu sekolah belum tercapai. Temuan penelitian, jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan harus sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan membangun kepercayaan, tranparansi dan kejelasan, kepemimpinan yang berwibawa dengan visi yang jelas serta memperhatikan sistem nilai yang berlaku (*political identity*).

Kata kunci : Jejaring kebijakan, MPMBS, komitmen, partisipasi, pelayanan publik

ABSTRACT

This study describes the Network Policy Within Policy Implementation Based Quality Improvement Management School in Public Elementary School Bandung City that has not been effective. The problems faced, that the implementing organization in this case Bandung City Education Department has not fully carry out the duties and authorities with responsibilities in the implementation of the policy MPMBS. As a policy target, the principal has not acted as an innovative and creative leader. The school board has not fully directed, provide input related to the implementation, school committees have not served as an advisor, supporter, controller and mediator for the school. Likewise, public elementary school in the city of Bandung has not been able to explore the potential, aspirations and participation of the world community, especially. The concept used in this research policy network from Smith. The interaction of the actors in the network that will determine how the policy should be implemented as the core of the network governace which focuses on inter-organizational networks. This concept is used to analyze the policy network that has not been effectively done through factors: the implementing organization, policy objectives, policies, environment is also the aspect of trust, transparency, governance rules and leadership and value systems that apply so that it can be used as a guide in describing policy network materialized.

The research method used is a qualitative approach, it is based on a research study that requires researchers to explore the various aspects of the policy network guidelines for policy implementation mpmbs in public elementary school of Bandung City as the perception and experience of informants. Informants in this study is the Head of Bandung, Head of Curriculum Section Bandung City Education Department, Principal, Board of Education, the School Committee, Superintendent of the Company.

The results showed that the policy network in policy implementation MPMBS in public elementary school of Bandung Cit .has not been effective, because the factors that support the policy network is still not fully perform their duties and responsibilities, and the role that school quality has not been reached. In the research, policy networks in policy implementation must be synergy between government, communities and businesses to build trust, transparency and clarity, authoritative leadership with a clear vision as well as taking into consideration the prevailing values ??(political identity).

Keywords : *Policy network, School Based Management, commitment, participation, and public service*